

BAB V

KESIMPULAN

Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim sejak dahulu kala. Jauh sebelum Indonesia merdeka, salah satu kerajaan Indonesia berhasil menguasai kekayaan laut Nusantara yang begitu melimpah. Negara maritim sendiri secara terbuka dicetuskan oleh Indonesia dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957. Laut sendiri memiliki arti penting bagi Indonesia yaitu sebagai *network* dari aktivitas perdagangan, politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali untuk dapat mengamankan laut Indonesia dari berbagai kejahatan di laut.

Pada tahun 2016, Indonesia harus berhadapan dengan kasus penculikan warga negara Indonesia secara berturut-turut. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan bagi warga Indonesia itu sendiri. Pelaku dari penculikan tersebut dikenal dengan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ini lahir sebagai organisasi yang menggunakan metode terorisme. Seperti halnya kelompok terorisme yang lain, mereka perlu sumber dana untuk dapat melakukan aksi-aksinya. Salah satu cara mereka untuk mendapatkan sumber dana yaitu dengan menculik dan meminta tebusan.

Akan tetapi, Indonesia berhasil membebaskan para sandera warga negara Indonesia dari kelompok Abu Sayyaf tanpa membayar uang tebusan. Hal tersebut sangat diapresiasi oleh dunia internasional. Indonesia tidak sendiri dalam membebaskan para sandera, yang terlibat dalam misi pembebasan tersebut tidak hanya antar negara dengan negara tetapi juga melibatkan beberapa aktor non-negara. Semua yang terlibat dalam misi tersebut dikoordinasi oleh Kemenrian Luar Negeri dan mengutamakan keselamatan para sandera yaitu warga negara Indonesia.

Kemudian tantangan selanjutnya yaitu bagaimana agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Oleh karena itu, Indonesia sadar perlu adanya upaya untuk meningkatkan keamanan laut yang lebih baik. Sebagai isu non-tradisional maka dibutuhkan kerjasama keamanan antar dua negara ataupun

lebih. Kemudian Indonesia bersama dengan Filipina dan Malaysia mengadakan beberapa kali pertemuan untuk dapat menyelesaikan masalah perompakan laut tersebut. Ini merupakan reaksi awal dari kasus penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. Hasil dari pertemuan ketiga negara tersebut yaitu bekerjasama dalam patroli menjaga perairan dari tindak kejahatan, reaksi ketiga negara mengenai tindak kejahatan di laut, saling tukar-menukar informasi dan berbagi intelijen dan pembahasan standar operasional prosedur (SOP).

Kebijakan Indonesia sendiri dalam meningkatkan keamanan lautnya sendiri dengan mengimplementasikan konsep *smart power*. konsep tersebut adalah upaya untuk menggapai kepentingan nasional dengan menggabungkan cara *hard power* dan *soft power*. Cara tersebut dipercaya lebih efektif ketimbang hanya mengandalkan salah satu dari *power* tersebut. Dari sektor *hard power*, TNI Angkatan Laut lah aktor utama dalam garda depan untuk mengamankan perairan Indonesia dari kejahatan laut. Dalam upayanya untuk mencegah penculikan warga negara Indonesia terulang kembali, Angkatan Laut bersama dengan angkatan bersenjata Malaysia dan Filipina bekerjasama dengan mengadakan patroli bersama yang dinamakan sebagai Patroli Maritim Indomaphil. Selain itu, patroli bersama Indomaphil tersebut didukung dengan diresmikannya *Maritime Command Center* (MCC) untuk dapat memaksimalkan kegiatan patroli bersama tersebut. Disamping itu, Angkatan Laut juga terus memaksimalkan kekuatan yang ada dengan pengadaan alutsista. Pemerintah dan Angkatan Laut melakukan beberapa upaya yang diantaranya adalah *modernization*, *build up*, dan *deployment*.

Kemudian dari sektor *soft power* yaitu dengan mengandalkan diplomasi yang menutut Kementerian Luar Negeri sebagai *leading sector* dalam mengkoordinasi pelaksanaannya. Dalam kaitannya dengan patroli bersama Indomaphil, diplomasi ini digunakan untuk dapat menyamakan persepsi dari ketiga negara untuk isu keamanan, keselamatan navigasi dan mengamankan alur laut serta proteksi lingkungan. Selain itu, upaya yang dilakukan Indonesia dalam mencegah

kejahatan di laut terutama pada perompakan laut oleh Abu Sayyaf adalah dengan menggunakan wadah organisasi ASEAN untuk menginisiasi penyelesaian dan pencegahan aktivitas kejahatan terorganisir yang terjadi di kawasan. Kemudian Indonesia juga melakukan kerjasama *intelligence exchange group* (IEG) bersama negara-negara sekitar. Hal ini merupakan wadah untuk menumbuhkan rasa saling percaya diantara negara anggota dan meningkatkan kapabilitas pertahanan serta dapat meningkatkan citra di mata dunia internasional. Dengan mengkombinasikan upaya dari kedua sektor tersebut, maka akan lebih efisien untuk dapat menggapai kepentingan nasional yaitu meningkatkan keamanan maritim.